2026

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto ini dapat terselesaikan dengan baik.

Renja BPKPD merupakan dokumen perencanaan BPKPD untuk periode 1 tahun, yang secara substansial merupakan penjabaran program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKPD. Namun kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan untuk perbaikan penyusunan Renja di tahun yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penyusunan Renja BPKPD Kota Mojokerto. Semoga Renja ini bermanfaat bagi BPKPD sebagai acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam RKA Tahun 2026 untuk penyelenggaraan program pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Mojokerto, 24 Juli 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH
KOTA MOJOKERTO

RIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690905 199003 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

Bab I. PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

Bab II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 5

2.1. Evalusi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra..... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD..... 33

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKPD..... 36

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 40

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 52

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH..... 53

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional..... 53

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD..... 54

3.3. Program dan Kegiatan..... 56

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 66

Bab V. PENUTUP..... 67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

a. Persiapan penyusunan ;
b. Penyusunan rancangan awal ;
c. Penyusunan rancangan ;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah ;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan

pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto.
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024
16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Menyediakan dokumen Rencana Kerja bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto pada Tahun 2025 dengan berdasarkan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2025 ;

2) Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja;
3) Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1.1. Latar Belakang,

1.2. Landasan Hukum,

1.3. Maksud dan Tujuan,

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD ;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/ kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan Renja BPKPD tahun lalu dan capaian Renstra BPKPD adalah mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra PD berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Adapun hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja BPKPD tahun lalu adalah sebagai berikut :

INDIKATOR 1: NILAI SAKIP

Tabel 3. 3 Indikator Ke-1

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	85,66	86,4	100,86%	Sangat Baik

Berdasarkan surat Inspektorat nomor: 700.1.2.7/1138/417.400.3/2024 Tanggal 9 September 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Bahwa Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 86,4 dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan" yaitu terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat

memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, dan telah melakukan pengukuran kinerja mulai pimpinan hingga pada level dibawahnya.

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	27,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**86,40**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**A**

WALI KOTA MOJOKERTO

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Atas Prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024
Dalam Predikat Nilai

" A "

(Memuaskan)

Mojokerto, 24 September 2024
Pj. WALI KOTA MOJOKERTO

MOH. ALI KUNCORO

INDIKATOR 2: INDEKS MANAJEMEN RISIKO

Tabel 3. 4 Indikator Ke-2

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	100%	Baik

Berdasarkan surat Inspektorat nomor: 700.1.2.7/201/417.400./2024 Tanggal 15 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akhir Tingkat Kematangan Penerapan

Manajemen Risiko. Nilai Indeks Penererapan Manajemen Risiko Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 yaitu 3.10 dengan kesimpulan level 3. Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Risiko Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah 3 yaitu Risiko Ditetapkan (Risk Defined). Proses Manajemen Risiko Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif.

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
INSPEKTORAT

Gambar 3. 1 Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI)

INDIKATOR 3: INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Tabel 3. 5 Indikator Ke-3

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,75	91,75	100%	Baik

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 mencapai target yakni 91,75 dari target 91,75. Data tersebut diambil melalui kegiatan survey kepada masyarakat dengan menggunakan aplikaso SUKMA-E JATIM. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto dapat melampaui standar pelayanan yang sudah tetapkan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik. Adapun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 1 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak baik
65,00 – 76,60	C	Kurang baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat baik

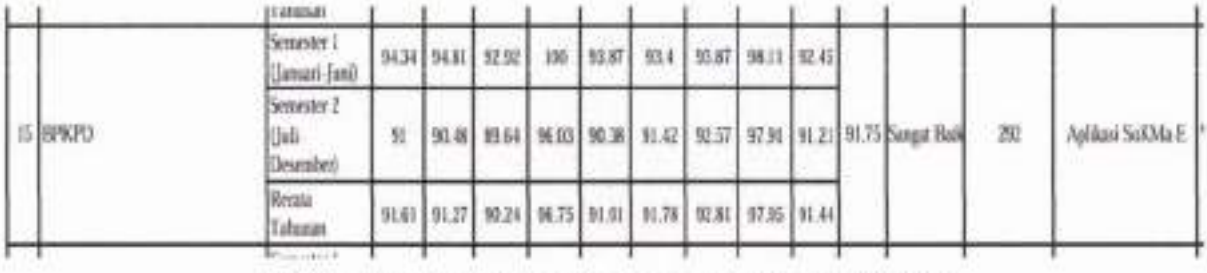

15	BPKPD	Semester 1 (Januari-Juni)	94.34	94.81	92.92	100	93.87	93.4	93.87	98.11	92.45	91.75	Sangat Baik	200	Aplikasi SuKMa E
		Semester 2 (Juli Desember)	91	90.48	89.64	96.03	90.38	91.42	92.57	97.91	91.21				
		Rerata Tahunan	91.61	91.27	90.24	96.75	91.01	91.78	92.81	97.95	91.44				

Gambar 3. 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

INDIKATOR 4: PERSENTASE PENGGUNAAN ANGGARAN SESUAI APBD

Tabel 3. 6 Indikator Ke-4

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya kualitas penggunaan Anggaran sesuai APBD	Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD	100%	94,29%	94,29%	Cukup

Untuk Indikator Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD, realisasi 2024 sebesar 94,29% dari target 100%. Data tersebut berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2024 Data Per 15 Januari 2024 (Unaudited). Menetapan target Indikator Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD tahun 2024 terlalu tinggi menyebabkan target tidak tercapai. APBD tidak dapat diserap tepat 100% atau melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu pada tahun selanjutnya akan dilakukan revisi dengan menurunkan target.

Hasil perhitungan tersebut didapat dari pengukuran komponen-komponen Belanja Daerah. Adapun komponen-komponen Belanja Daerah terdiri dari :

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga;

Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Komponen Belanja Daerah 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024 setelah Perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Belanja Operasi	924.733.858.565	881.387.889.533	95,31
2	Belanja Modal	157.400.338.112	147.891.506.058	93,96
3	Belanja Tak Terduga	9.679.493.980	150.739.700	1,56
	JUMLAH	**1.091.813.690.658**	**1.029.430.135.291**	**94,29**

Formula Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD 2024

$$\frac{realisasi\ anggaran\ tahun\ n}{Anggaran\ tahun\ n} \ x\ 100\%$$

$$\frac{1.029.430.135.291}{1.091.813.690.658} \ x\ 100\% = \mathbf{94,29\%}$$

INDIKATOR 5: PERSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKELOLA OPD

Tabel 3. 8 Indikator Ke-5

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Pengelolaan Aset yang tidak digunakan OPD	Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD	100%	100%	100%	Baik

Realisasi 2024 atas indikator kinerja Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD telah tercapai yakni 100% dari target 100%. Aset yang tidak dikelola OPD adalah aset yang melalui proses sebagai berikut:

a. Proses Penilaian
b. Proses Penjualan
c. Proses Penghapusan

Untuk memperoleh Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Formula Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD 2024

$$\frac{Jumlah\ Aset\ yang\ dikelola}{Total\ jumlah\ aset\ yang\ tidak\ digunakan\ OPD}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{Proses\ Penilaian + Proses\ Penjualan + Proses\ Penghapusan}{Total\ Jumlah\ Aset\ yang\ tidak\ digunakan\ OPD}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{0\ item\ barang + 8.480\ item\ barang + 461\ item\ barang}{8.941\ item\ barang}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{8.941}{8.941}\ x\ 100\%$$

INDIKATOR 6: PERSENTASE PENINGKATAN PAD

Tabel 3. 9 Indikator Ke-6

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	11%	5,41%	49,18%	Sangat Kurang

Untuk Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, realisasi 2024 sebesar 5,41% dari target 11%. Hasil perhitungan tersebut didapat dari pengukuran komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, menurunnya realisasi komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah, maka akan menurunkan persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah, demikian pula sebaliknya. Adapun komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Realisasi PAD Kota Mojokerto Tahun 2024 sebesar Rp. 270.623.653.368,66 dari target sebesar Rp. 277.618.024.743,00 atau 97,48% Adapun rincian PAD Kota Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Target dan Realisasi Komponen PAD 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024 setelah Perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pajak Daerah	88.815.600.000,00	90.931.898.741,00	102,38
2	Retribusi Daerah	159.944.516.261,00	148.317.798.002,00	92,73
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.921.070.337,00	3.921.070.336,89	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	24.936.838.145,00	27.452.886.288,77	110,09
	JUMLAH	**277.618.024.743,00**	**270.623.653.368,66**	**97,48**

Dari tabel Target dan Realisasi Komponen PAD 2024, diketahui bahwa terdapat komponen PAD yang berhasil memenuhi target yang ditetapkan dan terdapat juga komponen PAD yang belum memenuhi target. Komponen PAD yang memenuhi target yakni Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pencapaian pajak daerah diketahui dari target sebesar Rp. 88.815.600.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 90.931.898.741,00 atau 102,38%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diketahui dari target sebesar Rp. 3.921.070.337,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.921.070.336,89 atau 100,00%. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diketahui dari target sebesar Rp. 24.936.838.145,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 27.452.886.288,77 atau 110,09%.

Sedangkan komponen PAD yang belum memenuhi target yakni Retribusi Daerah dari target sebesar Rp. 159.944.516.261,00 dapat terealisasi sebesar Rp.

148.317.798.002,00 atau 92,73 hal ini belum mencapai dari jumlah target penerimaan sebesar Rp. 11.626.718.259,00 karena ret PBG/persetujuan bangunan gedung yang sangat rendah. Selain itu untuk retribusi parkir tepi jalan umum, Pemungutan belum optimal karena sejak 16 maret s/d 30 september belum ada dasar hukum PKS Parkir sehingga hanya ditarik secara konvensional (bagi kendaran luar Mojokerto Raya). Pemungutan parkir berlangganan mandiri baru di laksanakan sejak tanggal 1 oktober 2024

Rincian penerimaan dari Retribusi Daerah, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. 11 Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah tahun 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024 setelah Perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Retribusi Jasa Umum	155.359.531.021,00	145.763.147.729,00	93,82
2	Retribusi Jasa Usaha	2.184.985.240,00	1.816.128.640,00	83,12
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.400.000.000,00	738.521.633,00	30,77
	JUMLAH	**159.944.516.261,00**	**148.317.798.002,00**	**92,73**

Formula Persentase Pertumbuhan PAD 2024

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 2024

$$= \frac{Realisasi\ tahun\ n - Realisasi\ tahun\ n-1}{Realisasi\ tahun\ n-1}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{270.623.653.368,66 - 256.729.510.362,44}{256.729.510.362,44}\ x\ 100\%$$

$$= 5,41\%$$

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
04.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH										
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP**			**A**						
		Indeks MR			**3**						
		Indeks Kepuasan Masyarakat			**88,3**						
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan			100%						
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			47 orang/bulan						
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen						

5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan						
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi			100%						
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset/tanah yang PBBnya dibayar tepat waktu			1 Laporan						
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan			100%						
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			6 Paket						
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket						
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket						
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6 Paket						
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen						
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60 Laporan						
		Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar			60 Laporan						

		Jumlah KunjunganTamu yang difasilitasi			12 Kali						
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ			100%						
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			25 Unit						
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan			100%						
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			60 Laporan						
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			80 Laporan						
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik			100%						
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			28 unit						
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2201 Unit						
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/			1 unit						

		Drehabilitasi									
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan			**WTP**						
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun tepat waktu			100%						
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 dokumen						
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 dokumen						
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			2 dokumen						
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2 dokumen						
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelayanan pengelolaan perbendaharaan daerah			100%						
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			60 laporan						
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			440 dokumen						
		Jumlah SP2D yang			8000						

		diproses sesuai ketentuan yang berlaku			SP2D						
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			1 dokumen						
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			200 Orang						
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP			100%						
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			852 Dokumen						
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			86 Laporan						
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana			1 Laporan						
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1 Laporan						

5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik			90%						
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola			90%						
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun			2 Dokumen						
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			25 Dokumen						
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daersh	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			2 Laporan						
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			4 Laporan						
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			**50 Orang**						
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah			100%						
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah			100%						
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			2 Dokumen						
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			720 Layanan						
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi			1200 Dokumen						

5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah			240 Dokumen						
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			1 Laporan						
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH										
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5.02	**KEUANGAN**										
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penatausahaan Sesuai Ketentuan persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran Persentase Laporan Keuangan OPD dengan Catatan Baik***				**100 % 100 % 100 %**	**100 % 100 % 100 %**	**100 % 100 % 100 %**			
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase dokumen rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS yang disusun tepat waktu Persentase dokumen rancangan perda dan perwali APBD serta rancangan perda dan perwali P-APBD yang disusun tepat waktu*				100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %			
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS										
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			

5.02.0 2.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			
5.02.0 2.2.01. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			
5.02.0 2.2.01. 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			
5.02.0 2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan Persentase Layanan Perbendaharaan sesuai Ketentuan Persentase Layanan Perbendaharaan sesuai Ketentuan*				100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %			

5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				60 Dokumen	60 Dokumen	100 %			
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait										
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				440 Dokumen	440 Dokumen	100 %			
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan										
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %			
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Orang yang				200 Orang	200 Orang	100 %			

		Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP* *Persentase OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Kas dan Akuntansi tepat waktu*				100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %			
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban										
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				852 Dokumen	852 Dokumen	100 %			
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran										
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				86 Laporan	86 Laporan	100 %			
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana*				1 Laporan	1 Laporan	100 %			
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										
		Jumlah Laporan Hasil				1 Laporan	1 Laporan	100 %			

		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase Barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan***				**90 %**	**90 %**	100 %			
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang di Monev Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai aturan yang berlaku*				100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %			
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga										
		Jumlah Standar Harga yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	100 %			
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				24 Dokumen	24 Dokumen	100 %			
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100 %			
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	100 %			
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah				50 Orang	50 Orang	100 %			

		Pemerintah Kabupaten/Kota									
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah***				**100 %**	**100 %**	100 %			
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase realisasi pajak daerah* *Persentase realisasi piutang pajak daerah*				100 % 12 %	100 % 12 %	100 % 12 %			
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah										
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				720 Layanan	720 Layanan	100 %			
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah										
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1200 Dokumen	1200 Dokumen	100 %			
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				240 Dokumen	240 Dokumen	100 %			
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah										
		Jumlah Laporan Perkembangan				1 Laporan	1 Laporan	100 %			

		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah									
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**										
X.XX. 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD*** ***Indeks Manajemen Risiko BPKPD*** ***Nilai SAKIP BPKPD***				**88.6 - 2 Level 81.45 -**	**88.6 - 2 Level 81.45 -**	100 %			
X.XX. 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar*				100 %	100 %	100 %			
X.XX. 01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			
X.XX. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar*				100 %	100 %	100 %			
X.XX. 01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	100 %			
X.XX. 01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi*				100 %	100 %				
X.XX. 01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	100 %			

X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar*				100 %	100 %	100 %			
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	100 %			
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100 %			
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100 %			
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100 %			
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %			
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan				60 Laporan	60 Laporan	100 %			

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar*				100 %	100 %	100 %			
X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100 %			
X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100 %			
X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100 %			
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar*				100 %	100 %	100 %			
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100 %			
X.XX.01.2.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum										

8.0004	Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100 %			
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik*				100 %	100 %	100 %			
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	100 %			
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	100 %			
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100 %			
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH										
6	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										

5.02	**KEUANGAN**										
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Manajemen Risiko BPKPD*** ***Nilai SAKIP BPKPD*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD***							**2 Level** **81.45** **undefined** **88.6** **undefined**		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar*							100 %		
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2 Dokumen		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar*							100 %		
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							47 Orang/bulan		
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi*							100 %		
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							2 Laporan		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar*							100 %		

5.02.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							6 Paket		
5.02.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							12 Paket		
5.02.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							12 Paket		
5.02.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							12 Paket		
5.02.0 1.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							12 Dokumen		
5.02.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							60 Laporan		
5.02.0	Pengadaan Barang	*Persentase Barang*							100 %		

1.2.07	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar*									
5.02.0 1.2.07. 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							1 Unit		
5.02.0 1.2.07. 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							1 Unit		
5.02.0 1.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							5 Unit		
5.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar*							100 %		
5.02.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							12 Laporan		
5.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum							12 Laporan		

		Kantor yang Disediakan									
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik*							100 %		
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							5 Unit		
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							50 Unit		
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1 Unit		
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran***							**100 %**		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase dokumen rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS yang disusun tepat waktu Persentase dokumen rancangan perda dan perwali APBD serta rancangan perda dan*							100 % 100 % 100 % 100 %		

		penvaki P-APBD yang disusun tepat waktu Persentase laporan Pertatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan Persentase Layanan Perbendaharaan sesuai Ketentuan									
5.02.0 2.2.01. 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS										
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun							2 Dokumen		
5.02.0 2.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun							2 Dokumen		
5.02.0 2.2.01. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD							2 Dokumen		
5.02.0 2.2.01. 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala							2 Dokumen		

		Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan Persentase Layanan Perbendaharaan sesuai Ketentuan*							100 % 100 %		
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah							60 Dokumen		
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait										
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait							440 Dokumen		
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan										
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas							1 Dokumen		

		serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan									
5.02.0 2.2.02. 0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota							200 Orang		
5.02.0 2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP Persentase OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Kas dan Akuntansi tepat waktu*							100 % 100 %		
5.02.0 2.2.03. 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban										
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban							852 Dokumen		
5.02.0 2.2.03. 0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran										
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD							86 Laporan		

		Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana*							1 Laporan		
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							1 Laporan		
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase Barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan***							**95 %**		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang di Monev Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai aturan yang berlaku*							100 % 100 %		
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga										
		Jumlah Standar Harga yang Disusun							3 Dokumen		
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebuluhan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah							24 Dokumen		
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah							2 Laporan		
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian							4 Laporan		

		Barang Milik Daerah									
5.02.03.2.01.0013	Pembinsan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daersh Pemerintah Kabupaten/Kota							50 Orang		
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah***							**100 %**		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase realisasi pajak daerah Persentase realisasi piutang pajak daerah*							100 % 14 %		
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah							2 Dokumen		
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyeberluasan Kebijakan Pajak Daerah										
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyeberluasan Kebijakan Pajak Daerah							12 Laporan		
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek							12 Laporan		

		Pajak dan Wajib Pajak Daerah									
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah										
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah							720 Layanan		
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah										
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi							1200 Dokumen		
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah							240 Dokumen		
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah										
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah							1 Laporan		

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023, terdapat terdapat 4 program dan 12 kegiatan.
2. Pada tahun 2024, terdapat terdapat 4 program dan 13 kegiatan
3. Pada tahun 2025, terdapat terdapat 4 program dan 13 kegiatan

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan program/kegiatan serta untuk meminimalisir implikasi yang timbul terhadap capaian program rencana strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya SDM agar memiliki pola pikir kreatif, inovatif dan terampil yang dapat memberikan solusi alternatif terhadap kompleksitas permasalahan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Melakukan sinkronisasi data aset dengan OPD pengguna dan melakukan komunikasi yang aktif antara OPD, BPN, Notaris, Kelurahan, Kecamatan dan warga sekitar obyek sertifikasi status aset tanah dan melakukan identifikasi serta penyempurnaan tata kelola aset.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai pelayanan kinerja OPD maka diperlukan perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto untuk tahun 2025 dan telah dilakukan penandatangan kesepakatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

PERJANJIAN KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	86,4
		Indeks Manajemen Risiko	Level 3
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,75
2	Meningkatnya kualitas penggunaan Anggaran sesuai APBD	Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD	92,4%
3	Meningkatnya Pengelolaan Aset yang tidak digunakan OPD	Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD	100%
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,09%

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 28.409.278.684,00 ;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 1.329.714.248,00 ;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp. 1.304.517.400,00;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 1.036.695.680,00;

Sebagaimana analisis kinerja pelayanan yang sudah tertuang dalam Renstra SKPD selama 5 tahun kedepan apa saja kinerja yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Mojokerto untuk mencapai terlaksananya tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang dijalankan oleh SKPD sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target renstra perangkat daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	6		7	10	11	12
1	Nilai SAKIP		v	A	A	A	A	A	A
2	Indeks Manajemen Risiko		v	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
3	Indeks Kepuasan Masyarakat		v	88,6	88,6	88,6	91,75	91,7	91,7
4	Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD		v	100%	100%	100%	92,4%	100%	100%
5	Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD		v	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		v	10%	10%	10%	5,41%	10%	10%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan dalam Tugas Pokok dan Fungsi

Tabel 2.9

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan BPKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan BPKPD)	
1	2	3	4	5
➢ Pelayanan administrasi di bidang pajak daerah ➢ Pendataan Pajak Daerah ➢ Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah ➢ Sebagai koordinator Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pajak daerah tahun 2023 secara umum mencapai target, namun ada beberapa yang tidak mencapai target antara lain : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan PBB-P2. Untuk Realisasi Retribusi Daerah secara umum tidak mencapai target	SKPD mempunyai wewenang dalam menetapkan besarnya pajak daerah, menerima atau menolak pengajuan keberatan/pengurangan dari WP. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak baik secara online maupun offline tersedianya SDM dan sarana prasarana yang memadai Tersedianya payung hukum untuk memungut pajak daerah sebagaimana ditetapkan UU Peningkatan kinerja petugas pemungut pajak daerah disertai dengan pemberian penghargaan kinerja	Sosiologis masyarakat dan juga sebaran populasi tingkat ekonomi di masyarakat dapat mempengaruhi keputusan. Faktor sosial dan politis yang ada di wilayah kota Mojokerto Diperlukan kerja sama dengan pihak ke-III dan SKPD lain untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari SKPD Diperlukan bimbingan teknis atau diklat dari instansi diklat keuangan untuk peningkatan kualitas SDM petugas pemungut pajak Masih lemahnya penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran pajak/retribusi Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak Kerja sama dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan penertiban obyek pajak yang tidak membayar pajak/retribusi	Masih tingginya piutang pajak daerah, khususnya piutang PBB-P2 disebabkan piutang pelimpahan pendaerahan PBB-P2 dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 tepat waktu Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah sesuai UU nomor 1 tahun 2023 ttg PDRD Belum tersedianya ruang arsip dan komputer Kurangnya tenaga teknis (penilai, pemeriksa & juru sita)

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan BPKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan BPKPD)	
1	2	3	4	5
			Dampak ekonomi global yang dapat menurunkan kegiatan perekonomian di masyarakat misalnya pandemi, perang dan bencana alam	
Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank, pemantauan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD atas dasar Buku kas penerimaan dan pengeluaran dari bank jatim dengan buku kas BUD, serta penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pengelolsan keuangan daerah	Telah disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Telah dilaksanakannya bintek dan sosialisasi, penyusunan laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi bank Tersusunnya perwali dan kepwal tentang pengelolaan keuangan daerah, Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan dokumen administrasi keuangan	Telah tersedianya kebijakan/dasar hukum pengelolaan keuangan daerah Tersedianya SOP pencairan dana yang cukup jelas	Kebijakan pemerintah pusat di bidang pengelolaan keuangan yang berkembang sangat dinamis SKPD terkait tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan dan/atau dokumen keuangan yang dibutuhkan serta SDM yang tersedia kurang memadai	ruang pelayanan SP2D yang ada saat ini tidak memadai dan masih bercampur dengan pelayanan lainnya dan pelaksanaan tupoksi sehari-hari Tempat penyimpanan arsip belum memadai sehingga menyulitkan pencarian kembali Kurangnya jumlah personil pelaksana pengelola keuangan yang memadai
Penyusunan LKPD & Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Telah dilaksanakan bimtek & sosialisasi penyusunan LKPD Terlaksananya rekonsiliasi kas dan akuntansi	Telah tersedianya kebijakan akuntansi	Laporan keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi LKPD	Kurangnya pemahaman dan kesadaran OPD akan pentingnya rekonsiliaset aset dan akuntansi bulanan Kurangnya fitur fitur yang mempermudah penyusunan LK pada aplikasi keuangan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan BPKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan BPKPD)	
1	2	3	4	5
				Permasalahan server yang kurang stabil saat digunakan banyak pengguna dalam waktu bersamaan Belum adanya juknis penyusunan LK SKPD dan LKPD
Pengelolaan BMD/Aset	Masih cukup banyak tanah aset yang belum bersertifikat Masih cukup banyak tanah aset yang bermasalah	Terbatasnya personil yang mempunyai kompetensi terkait pengelolaan aset	Investor kurang berminat untuk menanamkan modalnya karena Kota Mojokerto dirasa kurang strategis Tidak ada alas hak	Kurangnya informasi, dokumen dan data terhadap aset, khususnya tanah yang menjadi aset pemerintah kota Masih kurang pahamnya OPD tentang prosedur penghapusan barang milik daerah dan kemampuan dalam teknologi informasi, serta penilaian aset
Penyusunan KUA, PPAS,APBD dan perubahan	Telah tersusunnya KUA,PPAS APBD dan perubahan Tersedianya aplikasi penyusunan APBD on line	Anggaran yang cukup tersedia	Peraturan yang sering berubah-ubah Lemahnya perencanaan program dan kegiatan SKPD Kurangnya pemahaman SKPD dalam penyusunan anggaran Terlambatnya informasi/juknis pelaksanaan anggaran pusat	Masih kurang pahamnya OPD tentang penyusunan RKA Keterlambatan OPD dalam melaporkan usulan kegiatan Penyusunan berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan BPKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan BPKPD)	
1	2	3	4	5
			Tidak semua anggaran belanja OPD mengacu pada SSH/HSPK/ASB	

2.3.2. Fomulasi Isu-Isu Strategis

Sebagaimana telah digambarkan diatas tentang gambaran pelayanan yang ada dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan adalah :

1. Pelaksanaan ektensifikasi dan intensifikasi pendapatan masih kurang optimal sehingga data yang ada kurang valid;
2. Tingginya jumlah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah;
4. Masih belum adanya pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya;
5. Penggunaan TI dalam Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal;
6. Pemahaman SKPD terhadap peraturan pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD/aset perlu di update karena peraturan tersebut sering berubah sejalan dengan kebijakan pemerintah;
7. Kurangnya tenaga teknis dan SDM pelaksana yang berkompeten;
8. Pendokumentasian dan pengamanan arsip masih lemah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD telah dilaksanakan setelah dilaksanakan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto. Dan hasil review tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD***	**91.75 undefined**	**19.962.318.684,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD***	**91.75 undefined**	**19.962.318.684,00**	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar*	100 %	1.335.685,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar*	100 %	1.335.685,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.335.685,00			*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	1.335.685,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar*	100 %	12.107.344.679,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar*	100 %	12.107.344.679,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	12.107.344.679,00			*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	47 Orang/bulan	12.107.344.679,00	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi*	100 %	15.798.843,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi*	100 %	15.798.843,00	
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.798.843,00			*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	2 Laporan	15.798.843,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar*	100 %	20.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar*	100 %	20.000.000,00	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20.000.000,00			*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	2 Orang	20.000.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar*	100 %	1.520.096.567,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar*	100 %	1.520.096.567,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	35.786.123,00			*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	6 Paket	35.786.123,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	87.424.378,00			*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	87.424.378,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	81.560.303,00			*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	81.560.303,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	180.801.807,00			*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	180.801.807,00	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	58.482.756,00			*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	58.482.756,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.076.041.200,00			*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	60 Laporan	1.076.041.200,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar*	100 %	1.143.332.700,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar*	100 %	1.143.332.700,00	
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	178.887.600,00			*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	1 Unit	178.887.600,00	
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	964.445.100,00			*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	964.445.100,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar*	100 %	4.495.257.946,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar*	100 %	4.495.257.946,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	198.181.400,00			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	198.181.400,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.297.076.546,00			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	4.297.076.546,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik*	100 %	659.152.064,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik*	100 %	659.152.064,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	131.811.400,00			*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	5 Unit	131.811.400,00	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	87.460.664,00			*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	50 Unit	87.460.664,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	439.880.000,00			*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	439.880.000,00	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		***Persentase Kualitas penganggaran yang disusun sesuai ketentuan***	**90 %**	**8.324.734.878,46**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		***Persentase Kualitas penganggaran yang disusun sesuai ketentuan***	**90 %**	**8.324.734.878,46**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		*Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran*	100 %	553.287.741,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		*Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran*	100 %	553.287.741,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	131.885.937,00			*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	2 Dokumen	131.885.937,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	131.840.787,00			*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	2 Dokumen	131.840.787,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	138.504.853,00			*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	2 Dokumen	138.504.853,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	151.056.164,00			*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	2 Dokumen	151.056.164,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		*Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan Persentase Layanan Perbendaharaan sesuai Ketentuan*	100 % 100 %	617.426.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		*Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan Persentase Layanan Perbendaharaan sesuai Ketentuan*	100 % 100 %	617.426.000,00	
5.02.02.2.02 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60 Dokumen	196.250.000,00			*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	60 Dokumen	196.250.000,00	
5.02.02.2.02 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	440 Dokumen	71.368.500,00			*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	440 Dokumen	71.368.500,00	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	201.348.300,00			*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*	1 Dokumen	201.348.300,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	148.459.200,00			*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	200 Orang	148.459.200,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		*Persentase OPD yang melakukan rekonsiliasi sesuai SAP Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP*	100 % 100 %	159.000.507,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		*Persentase OPD yang melakukan rekonsiliasi sesuai SAP Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP*	100 % 100 %	159.000.507,00	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	47.003.902,00			*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	2 Dokumen	47.003.902,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16 Laporan	111.996.605,00			*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	16 Laporan	111.996.605,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		*Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana*	1 Laporan	6.995.020.630,46	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		*Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana*	1 Laporan	6.995.020.630,46	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	6.995.020.630,46			*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	1 Laporan	6.995.020.630,46	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		***Jumlah Laporan Pengelolaan BMD yang disusun secara tepat waktu dan sesuai ketentuan***	**200 Laporan**	**1.304.517.400,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		***Jumlah Laporan Pengelolaan BMD yang disusun secara tepat waktu dan sesuai ketentuan***	**200 Laporan**	**1.304.517.400,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		*Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah Laporan Perencanaan dan Penatausahaan BMD yang disampaikan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan*	20 Laporan 152 Laporan	1.304.517.400,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah		*Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah Laporan Perencanaan dan Penatausahaan BMD yang disampaikan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan*	20 Laporan 152 Laporan	1.304.517.400,00	
5.02.03.2.01. 0001	Penyusunan Standar Harga					Penyusunan Standar Harga					
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	222.640.000,00			*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	3 Dokumen	222.640.000,00	
5.02.03.2.01. 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	25 Dokumen	5.590.000,00			*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	25 Dokumen	5.590.000,00	
5.02.03.2.01. 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah					Penatausahaa n Barang Milik Daerah					
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	200 Laporan	104.807.300,00			*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	200 Laporan	104.807.300,00	
5.02.03.2.01. 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah					Pengamanan Barang Milik Daerah					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	520.063.300,00			*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	2 Laporan	520.063.300,00	
5.02.03.2.01.0006	Penilaian Barang Milik Daerah					Penilaian Barang Milik Daerah					
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	451.416.800,00			*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*	4 Laporan	451.416.800,00	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		***Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah***	**100 %**	**1.036.695.680,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		***Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah***	**100 %**	**1.036.695.680,00**	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		*Jumlah dokumen potensi PAD Persentase realisasi PAD Selain Pajak Daerah Persentase realisasi pajak daerah*	1 Dokumen 100 % 100 %	1.036.695.680,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		*Jumlah dokumen potensi PAD Persentase realisasi PAD Selain Pajak Daerah Persentase realisasi pajak daerah*	1 Dokumen 100 % 100 %	1.036.695.680,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	272.091.210,00			*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*	2 Dokumen	272.091.210,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	44.189.935,00			*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	12 Laporan	44.189.935,00	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	106.400.000,00			*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	12 Laporan	106.400.000,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	720 Layanan	148.955.000,00			*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	720 Layanan	148.955.000,00	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1200 Dokumen	211.072.000,00			*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi*	1200 Dokumen	211.072.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah					Penagihan Pajak Daerah					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	240 Dokumen	153.987.535,00			*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	240 Dokumen	153.987.535,00	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100.000.000,00			*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	1 Laporan	100.000.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berupaya untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik tingkat kelurahan maupun kecamatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto belum ada usulan program maupun kegiatan yang harus diakomodir pada rencana kerja (RENJA) tahun 2025.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Untuk meningkatkan kualitas manusia dan taraf hidup masyarakat Indonesia di berbagai bidang dan sektor secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Propenas merupakan rencana induk dan acuan perencanaan nasional hasil konsensus serta komitmen bersama masyarakat Indonesia, yang memuat target pencapaian visi dan misi bangsa. Propenas juga merupakan sarana untuk menyatukan persepsi, pandangan dan langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia sesuai karakteristik dan budaya dalam menyusun dan melaksanakan prioritas pembangunan pada masa yang akan datang.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya tindak lanjut pelaksanaan desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah untuk melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat, utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Kota Mojokerto menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan kedua dokumen perencanaan tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan sebagai acuan rencana tindak, setiap tahun Pemerintah Kota Mojokerto menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijabarkan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dengan menyusun Rencana Kerja-Perangkat Daerah (Renja-PD) sehingga terjalin hubungan keselarasan yang saling melengkapi mulai dari proses perencanaan program kegiatan dan perencanaan anggaran sampai

dengan pertanggungjawaban dan pelaporan dengan tetap berpedoman pada Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi Kepala Daerah dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa mendatang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja BPKPD yang bersinergi dengan Rencana Strategis 2025-2030, yaitu "Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)".

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dan dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga bersinergi dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi, yaitu "Meningkatnya kualitas penggunaan Anggaran sesuai APBD", "Meningkatnya Pengelolaan Aset yang tidak digunakan OPD" dan "Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah".

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah sesuai Renstra 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,09	8	9	10	11	11

Adapun tujuan dari rencana kerja tahunan ini adalah sebagai bentuk dari evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dimana dalam pelaksanaan kegiatan untuk pelayanan yang diberikan oleh BPKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masih ada hambatan yang mempengaruhi, dan hambatan tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun selanjutnya yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang berkesinambungan.

Sedangkan yang menjadikan sasaran dari rencana kerja tahunan adalah pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang pada tahun sebelumnya dalam pelaksanaannya masih dirasa belum optimal capaian kegiatannya atau belum tuntas pelaksanaan kegiatannya.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh PD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk mengimplementasikan dari Visi Misi yang telah dibuat oleh Walikota Terpilih, sebagai wujud dari janji untuk melaksanakan pembangunan Kota Mojokerto selama 3 tahun ke depan, maka OPD sebagai pelaksana dari Visi, Misi tersebut tentunya akan menuangkannya dalam bentuk Program dan kegiatan. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPD yang tertuang dalam rencana kerja adalah merupakan perwujudan dari isu-isu pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya yang pengacu pada pelayanan BPKPD dalam menunjang visi dan misi walikota terpilih.

Prioritas program yang akan dilaksanakan oleh BPKPD Kota Mojokerto Tahun 2025 ditentukan dengan mensinergikan Prioritas Program Pembangunan Kota Mojokerto dengan Renstra BPKPD Kota Mojokerto kemudian diurutkan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak, dimana dalam prioritas program tersebut BPKPD Kota Mojokerto tercakup dalam agenda 1 yaitu :

Program Utama :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan) ;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah) ;

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (Bidang Aset).

Program Penunjang :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini bertujuan untuk menu judkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

Adapun rumusan program dan kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.33 berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				**30.628.266.642,46**				**32.159.679.974,00**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**30.628.266.642,46**				**32.159.679.974,00**
5.02	**KEUANGAN**				**30.628.266.642,46**				**32.159.679.974,00**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD***		**91.75 undefined**	**19.962.318.684,00**			-	**20.960.434.617,00**
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar*		100 %	1.335.885,00			-	1.402.679,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	1.335.885,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.402.679,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar*		100 %	12.107.344.679,00			-	12.712.711.913,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		47 Orang/bulan	12.107.344.679,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			12.712.711.913,00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi*		100 %	15.798.843,00			-	16.588.785,00
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	15.798.843,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16.588.785,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar*		100 %	20.000.000,00			-	21.000.000,00
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21.000.000,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar*		100 %	1.520.096.567,00			-	1.596.101.395,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6 Paket	35.786.123,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37.575.429,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	87.424.378,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			91.795.597,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	81.560.303,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85.638.318,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	180.801.807,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			189.841.897,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	58.482.756,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			61.406.894,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 Laporan	1.076.041.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.129.843.260,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar*		100 %	1.143.332.700,00			-	1.200.499.335,00
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	178.887.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)			187.831.980,00
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	964.445.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.012.667.355,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar*		100 %	4.495.257.946,00			-	4.720.020.843,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	198.181.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			208.090.470,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	4.297.076.546,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.511.930.373,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik*		100 %	659.152.064,00			-	692.109.667,00
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5 Unit	131.811.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			138.401.970,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	87.460.664,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			91.833.697,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	439.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			461.874.000,00
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase Kualitas penganggaran yang disusun sesuai ketentuan***		**90 %**	**8.324.734.878,46**			-	**8.740.971.622,00**
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran*		100 %	553.287.741,00			-	580.952.128,00
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	131.885.937,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			138.480.234,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	131.840.787,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			138.432.826,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2 Dokumen	138.504.853,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			145.430.096,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		2 Dokumen	151.058.164,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			158.608.972,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan Persentase Layanan Perbendaharaan sesuai Ketentuan*		100 % 100 %	617.426.000,00			-	648.297.300,00
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		60 Dokumen	196.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			206.062.500,00
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		440 Dokumen	71.368.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			74.936.925,00
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		1 Dokumen	201.348.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			211.415.715,00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		200 Orang	148.459.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			155.882.160,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase OPD yang melakukan rekonsiliasi sesuai SAP Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP*		100 % 100 %	159.000.507,00			-	166.950.532,00
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		2 Dokumen	47.003.902,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49.354.097,00
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran								
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		16 Laporan	111.996.605,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			117.596.435,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana*		1 Laporan	6.995.020.630,46			-	7.344.771.862,00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Daruret dan Mendesak								
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1 Laporan	6.995.020.630,46	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.344.771.862,00
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Jumlah Laporan Pengelolaan BMD yang disusun secara tepat waktu dan sesuai ketentuan***		**200 Laporan**	**1.304.517.400,00**			**-**	**1.369.743.270,00**
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah Laporan Perencanaan dan Penatausahaan BMD yang disampaikan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan*		20 Laporan 152 Laporan	1.304.517.400,00			-	1.369.743.270,00
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga								
		Jumlah Standar Harga yang Disusun		3 Dokumen	222.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			233.772.000,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		25 Dokumen	5.590.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.869.500,00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah								
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		200 Laporan	104.807.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110.047.665,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		2 Laporan	520.063.300,00	-			546.066.465,00
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		4 Laporan	451.416.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			473.987.640,00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah***		**100 %**	**1.036.695.680,00**			-	**1.088.530.465,00**
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah dokumen potensi PAD* *Persentase realisasi PAD Selain Pajak Daerah* *Persentase realisasi pajak daerah*		1 Dokumen 100 % 100 %	1.036.695.680,00			-	1.088.530.465,00
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		2 Dokumen	272.091.210,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			285.695.771,00
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		12 Laporan	44.189.935,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46.399.432,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		12 Laporan	106.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			111.720.000,00
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah								
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		720 Layanan	148.955.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			156.402.750,00
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah								
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		1200 Dokumen	211.072.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			221.625.600,00
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		240 Dokumen	153.987.535,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			161.686.912,00
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		1 Laporan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			105.000.000,00
					30.628.266.642,46				**32.159.679.974,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja berupa pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dijalankan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 19.962.318.684,00 yang terdiri dari 8 kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 1.335.885,00 ;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 12.107.344.679,00;
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 15.798.843,00;
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 20.000.000,00;
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 1.520.096.567,00;
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 1.143.332.700,00;
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 4.495.257.946,00,00 ;
   h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 659.152.064,00;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 8.324.734.878,46 yang terdiri dari 4 kegiatan :
   a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Rp. 553.287.741,00;
   b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Rp. 617.426.700,00;
   c. Persentase laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP Rp. 159.000.507,00;
   d. Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 6.995.020.630,46;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 1.304.517.400,00 dengan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 1.190.130.407,00;
4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp. 1.382.784.469,00 dengan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp. 1.036.695.680,00;

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto 2025-2030 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Mojokerto serta Target dan Sasaran Pembangunan.

Dengan adanya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama OPD di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto.

Akhir kata semoga Renja BPKPD Kota Mojokerto ini dapat dipergunakan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Mojokerto, 24 Juli 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH
KOTA MOJOKERTO

RIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690905 199003 1 006

LAMPIRAN

Pemutakhiran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

RENSTRA 2024 - 2026					PEMUTAKHIRAN				
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif 2025
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.02	KEUANGAN				5.02	KEUANGAN			
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD	81,45	23.125.800.324,35	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD	81,45	24.290.346.185
		Nilai SAKIP BPKPD	level 2				Nilai SAKIP BPKPD	level 2	
		Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD	88,6				Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD	88,6	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	100%	1.516.590,00	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	100 %	1.339.382,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.516.590,00	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.339.382,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	100%	9.047.007.095,65	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	100 %	8.929.567.308,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang	9.047.007.095,65	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	8.929.567.308,00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	100%	47.838.560,15	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	15.798.843,00

RENSTRA 2024 - 2026					PEMUTAKHIRAN				
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif 2025
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	47.838.560,15	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.798.843,00
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar**	**100%**	**1.230.000.592,45**	5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar**	100 %	1.440.242.304,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.232.475,00	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	17.900.691,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	98.809.692,50	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	87.425.988,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	178.642.022,50	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	46.831.733,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	204.348.689,38	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	180.807.956,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	43.494.850,00	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	58.484.334,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	684.472.861,08	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.048.791.600,00
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar**	**100%**	**260.440.476,75**	5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar**	100 %	1.133.765.004,00
					5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	1 Unit	178.887.600,00

RENSTRA 2024 - 2026					PEMUTAKHIRAN				
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program /	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif 2025
					5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	0,00
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	260.440.476,75	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	954.877.404,00
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar**	**100%**	**12.198.350.631,10**	5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar**	100 %	12.509.262.458,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.548.083.971,98	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.494.249.714,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.650.266.659,13	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.015.012.744,00
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik**	**100%**	**340.646.378,25**	5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik**	100 %	260.370.886,00
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	131.149.652,00	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	46.730.950,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	90.811.463,75	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	58.627.536,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	1 unit	118.685.262,50	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	155.012.400,00

RENSTRA 2024 - 2026					PEMUTAKHIRAN				
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif 2026	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif 2025
		si							
	Meningkatnya kualitas penggunaan Anggaran sesuai APBD	**Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD**	1	**9.432.890.686,55**					
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran**	**100%**	7.907.291.416,25	5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran***	**100 %**	**20.369.528.874**
		Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penatausahaan Sesuai Ketentuan	**100%**						
		Persentase Laporan Keuangan OPD dengan Catatan Baik	**100%**						
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase dokumen rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS yang disusun tepat waktu**	**100%**	**645.594.815,00**	5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase dokumen rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS yang disusun tepat waktu	100%	595.279.702
							Persentase dokumen rancangan perda dan perwali APBD serta rancangan perda dan perwali P-APBD yang disusun tepat waktu	100%	
		Persentase dokumen rancangan perda dan perwali APBD serta rancangan perda dan perwali P-APBD yang disusun tepat waktu	**100%**				Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan	100%	
							Persentase Layanan Perbendaharaan sesuai Ketentuan	100%	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	75.994.320,00	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	149.730.121,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang	2 Dokumen	84.200.982,50	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	154.700.522,00

RENSTRA 2024 - 2026					PEMUTAKHIRAN				
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif 2025
	Perubahan PPAS	Disusun							
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	285.300.857,50	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	2 Dokumen	139.106.838,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	200.098.655,00	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	2 Dokumen	154.700.522,00
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan**	**100%**	**694.120.826,25**	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan	100%	617.426.700,00
		Persentase Layanan Perbendaharaan sesuai Ketentuan	**100%**				Persentase Layanan Perbendaharaan sesuai Ketentuan	100%	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60 Dokumen	256.352.500,00	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60 Dokumen	196.250.000,00
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	440 Dokumen	74.225.375,00	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	440 Dokumen	71.368.500,00
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	1 Dokumen	209.352.150,00	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	201.348.550,00

RENSTRA 2024 - 2026					PEMUTAKHIRAN				
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif 2025
	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Sub Kegiatan							
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	154.190.801,25	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	148.459.650,00
		Jumlah SP2D yang diproses sesuai ketentuan yang berlaku	8000 SP2D						
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Kas dan Akuntansi tepat waktu**	**100%**	417.575.775,00	5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP**	100%	185.673.107,00
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	**100%**				**Persentase OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Kas dan Akuntansi tepat waktu**	100%	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	852 Dokumen	266.426.712,50	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	852 Dokumen	49.463.502,00
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	86 Laporan	151.149.062,50	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	86 Laporan	136.209.605,00
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan**	**Tersedianya dana darurat penanggulangan**	**1 laporan**	**6.000.000.000,00**	5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana**	1 Laporan	18.971.149.365,00

RENSTRA 2024 - 2026					PEMUTAKHIRAN				
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif 2025
	Keuangan Daerah	**bencana**							
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	6.000.000.000,00	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	18.971.149.365,00
	Meningkatnya Pengelolaan Aset yang tidak digunakan OPD	**Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD**	**100%**	**1.525.599.270,30**					
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan**	**95%**	1.571.367.248,41	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan**	**95 %**	**1.382.784.469,00**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai aturan yang berlaku**	**100%**	1.525.599.270,30	5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai aturan yang berlaku**	100%	1.382.784.469,00
		Persentase Barang Milik Daerah yang di Monev	**100%**				**Persentase Barang Milik Daerah yang di Monev**	100%	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	377.802.155,73	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	354.937.469,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	24 Dokumen	13.024.470,00	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	24 Dokumen	16.356.800,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	528.836.617,08	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	495.333.300,00
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	580.660.450,00	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	481.497.800,00
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	25.275.577,50	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	34.659.100,00

RENSTRA 2024 - 2026					PEMUTAKHIRAN				
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program /	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif 2025
	Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	**Persentase Peningkatan Pendapatan asli Daerah**	**10%**	**1.298.863.981,30**					
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah**	**100%**	1.298.863.981,30	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah**	**100 %**	**1.190.130.407,00**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase realisasi pajak daerah**	**100%**	1.298.863.981,30	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase realisasi pajak daerah**	100%	1.190.130.407,00
		Persentase realisasi piutang pajak daerah	**13%**				**Persentase realisasi piutang pajak daerah**	14%	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	348.027.997,96	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	307.091.210,00
					5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	12 Laporan	44.189.935,00
					5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	12 Laporan	140.600.000,00
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	720 Layanan	181.876.521,58	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	720 Layanan	187.762.462,00
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1200 Dokumen	233.177.834,92	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1200 Dokumen	227.490.571,00
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	240 Dokumen	233.281.624,84	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	240 Dokumen	182.996.229,00

RENSTRA 2024 - 2026					PEMUTAKHIRAN				
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif 2025
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	102.500.000,00	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100.000.000,00

KOTA MOJOKERTO